Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional
Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 141-149

STRATEGI PENGAMANAN LAUT INDONESIA TERHADAP ARUS PENGUNGSI ILEGAL

Ken Prama Abyasa[1], Deasy Silvya Sari[2], Neneng Konety[3]

[1,2,3]Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Indonesia,
Email : ken22002@mail.unpad.ac.id

Submitted: 21-12-2024; Accepted: 14-01-2025: Published : 16-01-2024

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola batas maritimnya yang luas, terutama terkait arus pengungsi ilegal. Studi ini menganalisis strategi pengamanan laut Indonesia secara komprehensif, dengan fokus pada modernisasi infrastruktur teknologi seperti sistem radar canggih, pemantauan berbasis satelit, dan drone untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap perlintasan ilegal. Selain itu, kerja sama regional melalui mekanisme ASEAN dan patroli gabungan dengan negara-negara tetangga memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan perbatasan. Studi ini juga menekankan pentingnya kebijakan terintegrasi untuk menangani pengungsi ilegal secara humanis tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), penelitian ini mengidentifikasi keamanan nasional sebagai prioritas utama, diikuti oleh penguatan infrastruktur dan kerja sama regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi, kerja sama lintas negara, dan reformasi kebijakan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi arus pengungsi ilegal di wilayah maritim Indonesia.

Kata Kunci: Keamanan maritim, Pengungsi ilegal, Indonesia, Kerja sama regional, Kerangka kebijakan, Integrasi teknologi.

ABSTRACT

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, faces significant challenges in managing its vast maritime boundaries, particularly concerning the influx of illegal refugees. This study analyzes Indonesia's maritime security strategies comprehensively, focusing on modernizing technological infrastructure such as advanced radar systems, satellite-based monitoring, and drones to enhance detection and response to illegal crossings. Additionally, regional cooperation through ASEAN mechanisms and joint patrols with neighboring countries plays a crucial role in strengthening border surveillance. The study also emphasizes the importance of integrated policies to manage illegal refugees humanely without compromising national interests. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP), the research identifies national security as the top priority, followed by infrastructure enhancement and regional collaboration. The findings indicate that technology-driven approaches, cross-border cooperation, and robust policy reforms are key to addressing the influx of illegal refugees in Indonesia's maritime domain.

***Key words**: Maritime security, Illegal refugees, Indonesia, Regional cooperation, Policy frameworks, Technology integration.*

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang pada saat ini sedang menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola batas maritimnya, terutama terkait arus pengungsi ilegal (Missbach, 2021). Oleh karena itu, hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan khususnya pada batas laut Indonesia yang luas. Muncul permasalahan terhadap arus pengungsi ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya perizinan. Artikel ini mengkaji strategi keamanan maritim Indonesia secara komprehensif terhadap arus pengungsi ilegal,

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 140-149

meliputi infrastruktur teknologi, kerangka kebijakan, dan mekanisme kerja sama regional. Dalam aspek keamanan laut tentu akan muncul beberapa pemangku kepentingan utama seperti Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), otoritas Imigrasi, pemerintah daerah, dan otoritas maritim negara-negara tetangga (Saha, 2023). Para aktor-aktor ini mempunyai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan keamanan laut Indonesia yang tentunya bertujuan untuk menjaga kedaulatan serta keamanan nasional Indonesia. Walaupun aktor-aktor tersebut telah bekerja dan menjalankan tugasnya dengan maksimal tetapi tentu masih terdapat celah dimana kesalahan bisa terjadi. Para pengungsi ilegal, masih dapat dengan mudah melewati batas perairan Indonesia dan masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya izin yang pasti. Artikel ini juga membahas mengenai wilayah perbatasan maritim Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah kritis seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan perairan antara Indonesia dan Australia, dimana pergerakan pengungsi paling sering terjadi. Wilayah ini cukup rawan karena memiliki cakupan yang sangat luas sehingga tidak dapatnya dilakukan penjagaan secara maksimal.

Analisis ini cukup relevan dalam konteks dunia pada saat ini khususnya di tahun 2020-2024 dimana terdapat peningkatan perpindahan penduduk secara regional dan arus pengungsi maritim yang dipicu oleh berbagai faktor geopolitik (Rahman, 2022). Hal ini, apabila dibiarkan secara terus menerus dapat memicu permasalahan keamanan nasional. Dengan masuknya pengungsi ilegal melewati jalur laut, maka dapat timbul konflik sosial yang dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Pengungsi ilegal yang tidak terdaftar dapat menimbulkan kekacauan serta keresahan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu berbagai aspek dari sosial, ekonomi, kesehatan, sampai dengan budaya.

Tentunya pembahasan dalam artikel ini bukan semata-mata didasari oleh permasalahan pengungsi yang biasa. Dibuatnya artikel ini didasari oleh adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka keamanan maritim Indonesia akibat berbagai aspek. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus perlintasan maritim ilegal. Menurut data dari BAKAMLA (Badan Keamanan Laut), telah terjadi peningkatan sebesar 35% dalam insiden perlintasan ilegal selama periode 2020-2023 (Putra & Rahman, 2023). Hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti konflik regional di berbagai negara Asia yang memaksa penduduk mereka untuk mencari suaka. Terdapat juga penggunaan teknologi navigasi modern oleh jaringan penyelundup manusia yang mempermudah proses perlintasan ilegal tersebut. Tidak hanya itu, adanya celah pengawasan di wilayah perairan Indonesia yang luas membuat perlintasan Indonesia semakin sering terjadi. Serta terdapat keterbatasan kapasitas patroli di beberapa wilayah perbatasan maritim Indonesia. Disisi lain, terdapat juga implikasi keamanan regional yang menjadi konflik dari masalah ini. Munculnya masalah perlintasan ilegal tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi juga terdapat implikasi signifikan terhadap keamanan Regional Asia Tenggara.

Tujuan utama dari artikel ini sendiri yaitu untuk mengembangkan kerangka kerja terintegrasi untuk meningkatkan keamanan maritim Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal melalui analisis terhadap infrastruktur keamanan maritim yang ada; Evaluasi mekanisme kerja sama regional; Penilaian implikasi keamanan nasional; serta Pengembangan alternatif strategis untuk perbaikan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode AHP (Analitik Hirarki Proses) dengan tujuan untuk menentukan pilihan-pilihan kebijakan terkait dengan "Strategi Pengamanan Laut Indonesia terhadap Arus Pengungsi Ilegal". Metode AHP sendiri digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multi-kriteria. Melalui website Universitas Ciputra dalam Studi Informatika, Metode ini dikembangkan oleh seorang profesor ilmu manajemen bernama Thomas L. Saaty pada tahun 1993. Menurut Saaty (1993), hierarki ini didefinisikan sebagai sebuah representasi suatu masalah yang kompleks dalam struktur multi-level. Multi-level tersebut terdiri dari level pertama yaitu target dari penelitian, lalu level kedua yaitu level faktor, diikuti dengan lanjutan level yang dimulai dari kriteria, sub-kriteria hingga level pilihan terakhir.

Dalam artikel ini level hirarki yang digunakan terdiri dari empat level yaitu Level

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 140-149

Target atau Ultimate Goal yaitu "Strategi Pengamanan Laut Indonesia terhadap Arus Pengungsi Ilegal". Lalu terdapat Level Faktor yang terdiri dari "Sarana Pengamanan Laut", "Kerjasama Regional", dan "Keamanan Nasional". Selanjutnya dari hirarki ini, terdapat Level Tujuan yang terdiri dari "Mencegah Masuknya Pengungsi Ilegal" dan 'Pengamanan Batas Laut Indonesia". Level terakhir dari hirarki ini yaitu Level Alternatif Strategi yang terdiri dari "Penguatan Sarana Teknologi Pengamanan Laut", "Penguatan Kebijakan Pengungsi", dan "Kerja Sama antar Negara". Berikut terlampir hirarki yang digunakan:

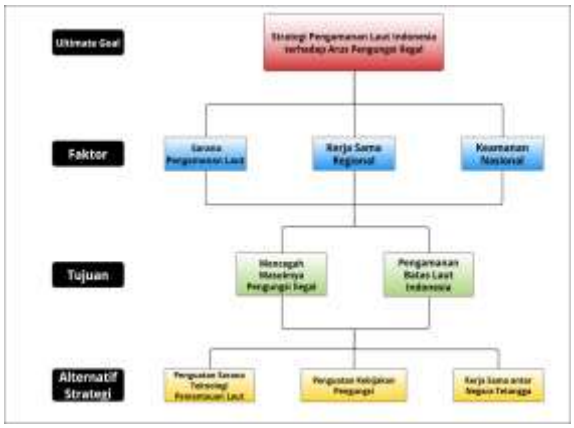

Gambar 3.1 Hierarki

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk artikel ini sendiri berupa pengisian kuesioner dan wawancara. Instrumen penelitian dalam artikel yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.2 AHP Level 1 Faktor

Gambar 3.3 Level 2 Tujuan

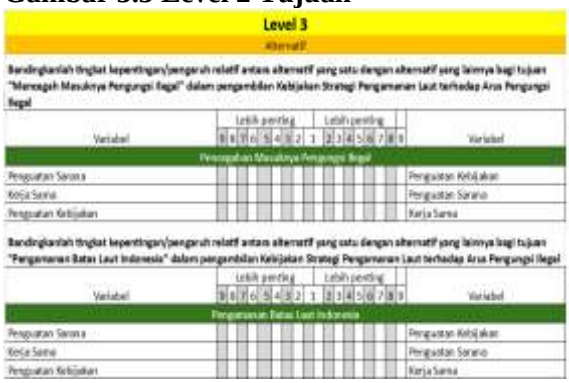

Gambar 3.4 Level 3 Alternatif Strategi

Untuk artikel ini sendiri dilakukan juga wawancara mendalam terhadap para responden dengan tujuan untuk menggali perspektif responden terkait sarana pengamanan laut, kerja sama regional dan keamanan nasional sebagai pengembangan "Strategi Pengamanan Laut Indonesia terhadap Arus Pengungsi Ilegal" . Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui proses wawancara dan kuesioner yang diberikan guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dipaparkan dalam beberapa matriks berikut, matriks yang pertama yaitu matriks perbandingan faktor dalam penentuan strategi pengamanan laut indonesia terhadap arus pengungsi ilegal. Berikut merupakan hasil analisis level 1 faktor strategi pengamanan laut indonesia terhadap arus pengungsi ilegal;

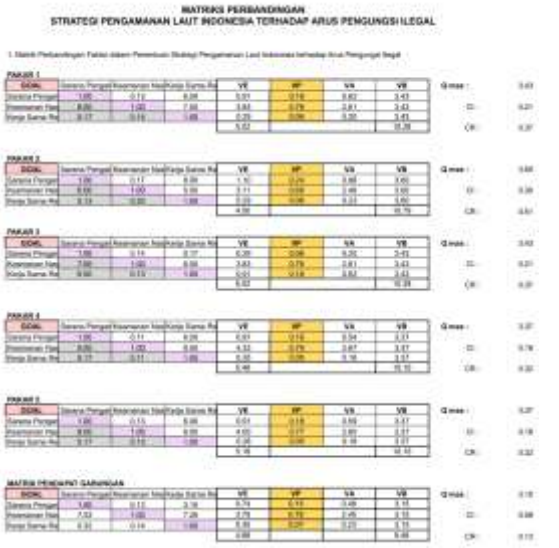

Gambar 4.1 Matriks Perbandingan Faktor Strategi Pengamanan Laut Indonesia terhadap Arus Pengungsi Ilegal

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 140-149

Dalam matriks perbandingan faktor penguatan strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal dapat ditarik kesimpulan dari hasil gabungan 5 pakar bahwa keamanan nasional menjadi salah satu faktor terpenting dalam penentuan strategi pengamanan laut indonesia, kemudian diikuti oleh sarana pengamanan laut, serta diikuti oleh kerja sama regional sebagai faktor terakhir berdasarkan tingkat kepentingan di dalam penentuan strategi pengamanan laut Indonesia.

Selanjutnya terdapat matriks perbandingan tujuan terhadap faktor sarana pengamanan laut dalam penentuan strategi pengamanan laut Indonesia. Berikut merupakan hasil analisis level 2 yaitu tujuan terhadap sarana pengamanan laut Indonesia;

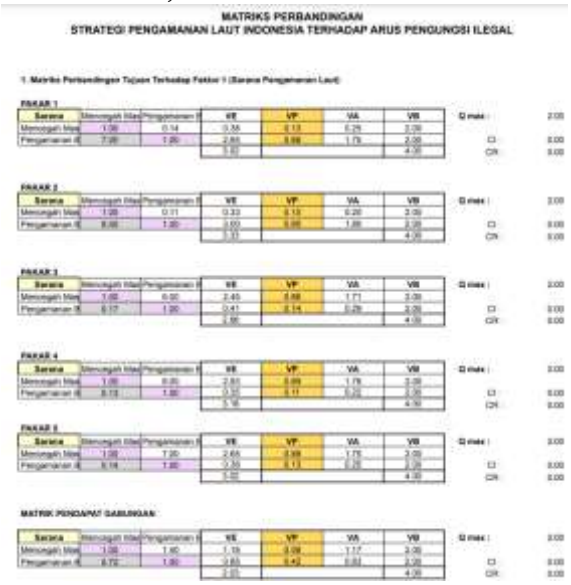

Gambar 4.2 Matrik Perbandingan Tujuan terhadap Faktor Sarana Pengamanan Laut

Pada matriks di atas dapat dilihat bahwa pada perbandingan tujuan terhadap faktor sarana pengamanan laut ditemukan bahwa pencegahan masuknya pengungsi ilegal merupakan tujuan yang lebih penting dibandingkan dengan pengamanan batas laut. Hal ini mengingat bahwa faktor sarana pengamanan laut mempunyai tujuan yang lebih utama ke arah pencegahan masuknya pengungsi ilegal dibandingkan dengan pengamanan batas laut Indonesia.

Selanjutnya terdapat matriks perbandingan antara tujuan terhadap faktor kerja sama regional dalam penentuan strategi pengamanan laut Indonesia. Berikut merupakan hasil analisis level 2 yaitu tujuan terhadap kerja sama regional dalam strategi pengamanan laut Indonesia;

Gambar 4.3 Matriks Perbandingan Tujuan terhadap Faktor Kerja Sama Regional

Berdasarkan matriks di atas dapat disimpulkan bahwa pengamanan batas laut Indonesia menjadi suatu hal yang lebih penting dibandingkan mencegah masuknya pengungsi ilegal dalam konteks faktor kerja sama regional. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa para responden setuju bahwa tujuan dari faktor kerja sama regional lebih mengarah pada pengamanan batas laut Indonesia.

Lalu terdapat matriks perbandingan antara tujuan terhadap faktor keamanan nasional dalam penentuan strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal. Berikut merupakan hasil analisis level 3 yaitu tujuan terhadap faktor keamanan nasional dalam strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal;

Gambar 4.4 Matriks Perbandingan Tujuan terhadap Faktor Keamanan Nasional

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 140-149

Melalui matriks perbandingan tujuan terhadap faktor keamanan nasional di atas ditemukan bahwa pengamanan batas laut menjadi tujuan yang didahulukan dalam pengambilan keputusan strategi pengamanan laut Indonesia. Tujuan pengamanan batas laut lebih penting dibandingkan dengan mencegah masuknya pengungsi ilegal dalam konteks faktor keamanan nasional

Tahap selanjutnya yaitu matriks perbandingan indikator alternatif terhadap tujuan mencegah masuknya pengungsi ilegal dalam penentuan strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal. Berikut merupakan hasil analisis level 3 yaitu alternatif terhadap tujuan mencegah masuknya pengungsi ilegal dalam pengambilan keputusan strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal;

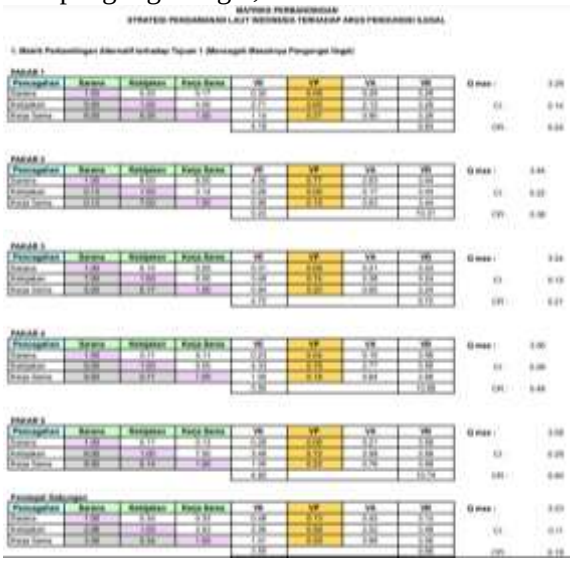

Gambar 4.5 Matriks Perbandingan Alternatif terhadap Tujuan Mencegah Masuknya Pengungsi Ilegal

Dalam matriks perbandingan alternatif terhadap tujuan pencegahan masuknya pencegahan masuknya pengungsi ilegal, penguatan kebijakan merupakan alternatif strategi yang paling penting dalam tujuan pencegahan masuknya pengungsi ilegal, lalu diikuti dengan kerja sama antar negara tetangga, dan yang terakhir yaitu penguatan sarana sebagai salah satu alternatif tingkat terakhir dalam pengambilan keputusan strategi pengamanan laut terhadap arus pengungsi ilegal.

Lalu selanjutnya yaitu matriks perbandingan antara alternatif terhadap tujuan pengamanan batas laut Indonesia. Berikut merupakan hasil analisis level 3 yaitu alternatif terhadap tujuan pengamanan batas laut Indonesia dalam pengambilan keputusan strategi pengamanan laut terhadap arus pengungsi ilegal;

Gambar 4.6 Matriks Perbandingan Alternatif terhadap Tujuan Pengamanan Batas Laut Indonesia

Berdasarkan matriks perbandingan alternatif diatas, dapat dilihat bahwa penguatan sarana menjadi alternatif yang paling kuat dalam konteks tujuan pengamanan batas laut Indonesia. Lalu yang kedua yaitu kerja sama antar negara dan diikuti oleh penguatan kebijakan yang menjadi pilihan terakhir. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa alternatif strategi berupa penguatan sarana menjadi suatu hal yang penting dalam pengambilan keputusan strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal dalam konteks tujuan pengamanan batas laut Indonesia.

Berdasarkan matriks perbandingan faktor, keamanan nasional menjadi faktor prioritas utama dalam pengambilan keputusan strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal. Hal ini secara langsung mencerminkan pentingnya menjaga kedaulatan negara, melindungi integritas perbatasan, dan memastikan stabilitas keamanan internal. Seperti yang telah diketahui juga isu pengungsi ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Menurut Darmono (2010), Keamanan Nasional (Kamnas) dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun fungsi. Dengan adanya keamanan nasional ini maka dapat memproduksi dan menciptakan rasa aman yang dimana masyarakat dapat hidup dengan damai dan tertib. Pada dasarnya keamanan nasional ini bersifat luas dan tidak

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 140-149

hanya berfokus pada satu aspek keamanan. Mulai dari keamanan laut, permasalahan dinamika sosial, serta ekonomi juga menjadi perhatian khususnya apabila dihubungkan dengan isu pengungsi ilegal ini.

Melalui website Kominfo Jatim, imigran gelap atau dalam hal ini pengungsi ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia dapat secara perlahan menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam prosesnya, pengungsi ilegal ini dapat saja disusupi oleh kegiatan kriminal seperti terorisme, people smuggling, transnational crime, dan bahkan perdagangan narkotika. Oleh karena itu, pengungsi ilegal yang masuk ke Indonesia dapat dibilang secara perlahan mengancam keamanan nasional Indonesia. Dengan segala dinamikanya permasalahan isu pengungsi ilegal ini harus secara efektif diatasi dari segi pencegahan dan pengamanan apabila telah masuk ke dalam wilayah Indonesia. Sehingga pembangunan infrastruktur suaka yang memadai dan terorganisir perlu dilakukan agar pengungsi ilegal ini dapat dimonitor. Tetapi seperti yang diketahui, lebih baik mencegah daripada mengobati, maka artikel ini akan lebih berfokus pada proses, cara, dan strategi dalam mencegah agar kuantitas pengungsi ilegal ini berkurang ke depannya. Pemerintah Indonesia harus mulai memperkuat pertahanannya mau dari segi sarana prasarananya, kebijakannya, serta proses kerja sama regional agar strategi yang dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan pada kenyataannya di lapangan.

Berdasarkan faktor sarana pengamanan laut, pencegahan masuknya pengungsi ilegal menjadi tujuan yang paling penting. Melalui Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, dijelaskan bahwa pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Adanya sarana pengamanan laut seperti radar canggih, kamera pengintai, dan sistem pemantauan berbasis satelit dapat secara efektif mendeteksi pergerakan kapal yang mencurigakan secara lebih awal dan cepat. Dengan adanya sarana ini maka deteksi dini dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga otoritas keamanan dapat merespons ancaman sebelum kapal pengungsi ilegal memasuki wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus segera mulai mengembangkan sarana pengamanan laut dan mulai menggunakan teknologi canggih seperti sistem identifikasi otomatis (AIS) serta sistem pemantauan kapal (VMS) yang sangat penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di perairan Indonesia. Pelatihan pendidikan angkatan laut terhadap sistem dan sarana modern juga harus mulai dilakukan agar anggota militer dapat mulai terbiasa dalam pengoperasian sarana militer yang lebih maju. Indonesia harus mulai berorientasi pada sistem prasarana teknologi yang modern agar dapat secara maksimal melakukan pencegahan masuknya pengungsi ilegal ke dalam wilayah Indonesia.

Faktor selanjut membahas mengenai kerja sama regional yang dimana pengamanan batas laut menjadi tujuan penting dalam mencegah masuknya pengungsi ilegal. Menurut Atamimi dan Azzqy (2020), kerja sama regional yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melakukan patroli terkoordinasi di Laut Sulu. Kerja sama regional ini secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim Indonesia. Tidak hanya itu, menurut Manullang (2023), Indonesia yang memegang kepemimpinan dalam ASEAN Coast Guard Forum memberikan peran yang signifikan terhadap keamanan maritim Indonesia sendiri. Kepemimpinan Indonesia ini memungkinan negara-negara anggota untuk berdialog dan bekerja sama dalam isu keamanan maritim.

Sehingga dalam prosesnya kerja sama regional ini dapat memperkuat koordinasi antara coast guard negara masing-masing yang juga membantu dalam mencegah penyelundupan dan aktivitas ilegal lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kerja sama regional ini secara signifikan dapat membantu Indonesia dalam mencapai tujuan pengamanan batas laut sehingga dapat secara efektif mencegah masuknya pengungsi secara ilegal. Kegiatan kerja sama ini harus terus dilakukan guna bertukar informasi, peningkatan sarana prasarana, dan pelatihan bersama dengan tujuan untuk menangani potensi-potensi kriminal yang dapat terjadi di wilayah laut Indonesia dan sekitarnya.

Melalui faktor keamanan nasional, pengamanan batas laut menjadi tujuan yang diprioritaskan dalam pengambilan keputusan strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal. Seperti yang telah

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 140-149

disebutkan sebelumnya, keamanan nasional berkaitan erat dengan pengamanan batas laut. Keamanan nasional Indonesia pada dasarnya memastikan Indonesia mempunyai kapasitas dan kekuatan untuk melakukan pengamanan batas laut Indonesia. Oleh karena itu, berbagai tindakan akan dilakukan pemerintah Indonesia agar dapat mencegah masuknya pengungsi secara ilegal. Tetapi walaupun pada kenyataan masih banyaknya pengungsi ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. Dilansir dari website Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Agustus 2021 terdapat sekitar 13.343 pengungsi dari berbagai negara yang masuk ke wilayah Indonesia. Menurut UNHCR (2023) terdapat sekitar 1.752 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia secara ilegal dengan diturunkan dari kapal di beberapa lokasi seperti Aceh dan Sumatera Utara.

Hal ini secara signifikan tentu akan mempengaruhi keamanan nasional Indonesia khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Seperti yang telah diketahui pengungsi ilegal ini dapat saja terlibat dalam tindakan kriminal seperti terorisme, penyelundupan manusia, atau bahkan transaksi narkoba. Walaupun cakupannya mungkin tidak terlalu luas, tetapi para pengungsi ilegal ini dapat mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat lokal khususnya di wilayah yang menjadi suaka para pengungsi tersebut. Dalam jangka panjang sendiri terdapat kemungkinan muncul konflik antar masyarakat lokal dengan para pengungsi sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat yang pada akhirnya menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini secara cepat.

Dalam pengambilan keputusan strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal ini, alternatif strategi yang ditemukan dalam konteks tujuan mencegah masuknya pengungsi ilegal yaitu penguatan kebijakan. Penguatan kebijakan menjadi alternatif strategi yang paling cocok dan paling efektif dalam hal mencegah masuknya pengungsi ilegal. Karena dengan adanya kebijakan yang ketat, terarah, dan terkoordinasi maka proses pencegahan masuknya pengungsi ilegal dapat dilakukan dengan maksimal. Pembuatan kebijakan ini bukan hanya berfokus pada pengungsi ilegal yang masuk ke Indonesia tetapi pada keamanan pengamanan dalam aspek militer dan jajarannya. Adanya kebijakan yang mengatur secara jelas mengenai tugas pemangku kepentingan utama seperti Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), otoritas Imigrasi, pemerintah daerah, dan otoritas maritim negara-negara tetangga (Saha, 2023).
Para aktor-aktor tersebut mempunyai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan keamanan laut Indonesia yang tentunya bertujuan untuk menjaga kedaulatan serta keamanan nasional Indonesia. Kebijakan yang tepat akan dapat memaksimalkan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan tersebut. Disisi lain dengan adanya kebijakan yang memang sudah ditetapkan perihal arus pengungsi ilegal maka akan muncul urgensi serta keharusan pihak-pihak yang terkait untuk menjaga batas laut Indonesia agar tidak adanya tindakan ilegal yang terjadi di wilayah Indonesia. Seperti contohnya kebijakan yang mengatur kerja sama dengan UNHCR dengan tujuan untuk membantu memastikan bahwa pengungsi ilegal ini ditangani sesuai dengan standar internasional tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Disisi lain, melalui aspek tujuan pengamanan batas laut Indonesia, alternatif strategi yang paling penting dilakukan yaitu penguatan sarana. Hal ini cukup masuk akal mengingat mayoritas responden memilih alternatif penguatan sarana dalam aspek tujuan pengamanan batas laut Indonesia karena proses pengamanan batas laut Indonesia secara langsung berhubungan dengan kapasitas sarana keamanan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti yang kita ketahui sarana prasarana militer laut Indonesia pada dasarnya masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Adanya peningkatan jumlah dan kualitas kapal patroli, pengembangan teknologi radar, serta pelatihan personel menjadi suatu yang wajib diprioritaskan. Sebagai contohnya, implementasi program modernisasi Bakamla yang telah meningkatkan kemampuan respons terhadap pelanggaran batas di Laut Natuna Utara. Penguatan sarana ini dianggap sebagai salah satu strategi yang paling penting dalam tujuan untuk pengamanan batas laut. Karena pada dasarnya apabila tidak adanya sarana yang mumpuni maka wilayah batas laut Indonesia akan terus disusupi berbagai kegiatan kriminal yang dapat merugikan kedaulatan Indonesia.
Strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal pada dasarnya membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan keamanan nasional,

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 140-149

penguatan sarana, kerja sama regional, dan kebijakan yang solid. Implementasi dari penguatan sarana ini pada dasarnya mencerminkan prioritas negara dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kapasitas sarana Indonesia harus mulai ditingkatkan dan beralih kepada teknologi yang lebih maju dan modern agar dapat secara maksimal mencegah serta mengurangi kuantitas pengungsi ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. Walaupun memang dengan luasnya wilayah laut Indonesia mungkin pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal, tetapi sudah seharusnya adanya pengembangan strategi agar jumlah pengungsi ilegal ini berkurang.

SIMPULAN

Secara kesimpulan, artikel ini membahas mengenai strategi pengamanan laut Indonesia dalam menghadapi arus pengungsi ilegal yang menjadi tantangan signifikan bagi keamanan nasional dan kedaulatan negara. Dengan cakupan wilayah laut yang luas, permasalahan ini melibatkan faktor seperti konflik regional, penyelundupan manusia, dan celah pengawasan yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak sah.

Infrastruktur pengamanan laut menjadi suatu aspek yang penting dalam hal modernisasi teknologi seperti radar canggih, drone, dan sistem pemantauan berbasis satelit untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap perlintasan ilegal. Kerja sama regional juga harus mulai ditingkatkan dengan tujuan untuk koordinasi dengan negara-negara tetangga melalui mekanisme ASEAN dan patroli gabungan untuk memonitor jalur strategis dan berbagi informasi. Disisi lain, diperlukan juga kebijakan yang terintegrasi, jelas, dan kuat untuk mengelola pengungsi ilegal, termasuk peran UNHCR dalam memastikan kepatuhan terhadap standar internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia juga harus mulai berfokus pada aspek keamanan nasional dengan melindungi integritas perbatasan, stabilitas internal, serta mencegah infiltrasi ancaman seperti terorisme dan konflik sosial.

Artikel ini pada dasarnya merekomendasikan pendekatan strategis yang komprehensif, menggabungkan teknologi modern, penguatan kebijakan, dan kerja sama internasional untuk mengurangi masuknya pengungsi ilegal ke wilayah Indonesia secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, K., & Wijaya, B. (2023). Maritime security cooperation in Southeast Asia: Emerging paradigms. *Asian Security Studies*, 15(2), 78-92.

Atamimi, R. A., & Rahman Azzqy, A. A. (2020, March 3). Upaya Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (INDOMALPHI) dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Sulu Pada Periode 2016-2019. Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy, 4(1). https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/218

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2018, April 19). Indonesia Dan Australia Pererat Kerjasama Maritim Melalui Pertemuan Indonesia-Australia Transport Sector Forum. Portal Departemen Hubungan. https://portal.dephub.go.id/post/read/indonesia-dan-australia-pererat-kerjasama-maritim-melalui-pertemuan-indonesia-australia-transport-sector-forum

Chen, L., & Abdul, R. (2022). Infrastructure development in maritime security: An ASEAN perspective. *Maritime Policy & Management*, 49(3), 301-315.

Darmono, B. (2010, April). Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional, 15(1). https://doi.org/10.22146/jkn.22307

Davidson, M. (2023). Technological advances in maritime border protection. *International Journal of Maritime Security*, 8(4), 156-170.

Dinas Kominfo Prov. Jatim. (2020, November 2). IMIGRAN GELAP DAPAT GANGGU KEAMANAN NASIONAL. Kominfo Jatimprov. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/24380#:~:text=Imigran%20gelap%2Filegal%20yang%20masuk,politik%2C%20keamanan%20dan%20ketertiban%20masyarakat.

Jefrianto Bondi, A. P., Aradoni, E. B., & Arman, Y. (2023, July 6). Penguatan Kebijaksanaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara.

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 3, Desember 2024 Hal : 140-149

Zenodo. https://zenodo.org/records/8149032

Johan, E. (2013, January 4). KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA. Jurnal Ilmu Hukum, 28(1), 1-15. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i1.5712

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2021, October 28). Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia – Direktorat Jenderal Imigrasi. Imigrasi Republik Indonesia. https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia?lang=id-ID

Manullang, A. J. (2023). Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum. Jurnal Hubungan Luar Negeri, 8(Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hubungan Luar Negeri), 18-30. https://doi.org/10.70836/jh.v8i2.17

Missbach, A. (2021). Protecting maritime borders: Indonesia's integrated approach. *Journal of Refugee Studies*, 34(1), 45-61.

Muthmainna, W. N. A., Supriyanto, H., & Novianti, W. (2024). Upaya Pengamanan Laut Indonesia Terhadap Sumber Daya Perikanan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 10633–10645. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9120

Purnomo, S., & Lee, J. (2023). National security implications of maritime refugee movements. *Security Studies Quarterly*, 28(2), 112-127.

Rahman, M. (2022). Regional displacement patterns in Southeast Asia. *Asian Migration Review*, 12(1), 23-38.

Saha, R. (2023). Maritime security agencies in Indonesia: Roles and challenges. *Southeast Asian Affairs*, 18(4), 89-103.

Thompson, R. (2023). Regional cooperation mechanisms in maritime security. *Pacific Affairs*, 96(2), 234-248.

Tim Setjen Wantannas RI. (2010). Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia. Setjen Wantannas RI. https://www.wantannas.go.id/storage/buku/kamnas-wantannas.pdf

UNHCR. (2023, June). Sekilas Data – UNHCR Indonesia. UNHCR. https://www.unhcr.org/id/sekilas-data

Wijaya, A., Smith, B., & Chen, K. (2023). Maritime security infrastructure assessment methods. *Marine Policy*, 147, 104988.

Zhang, H. (2022). Policy frameworks for maritime refugee management. *Journal of Maritime Law and Commerce*, 53(3), 299-314.